

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dipaparkan dalam bab ini merujuk pada jawaban atas permasalahan penelitian yang telah dikaji oleh penulis di dalam skripsi yang berjudul *Peta Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dalam Pemilihan Umum Tahun 1999 Di Jawa Barat*. Setelah dilakukan pengkajian terhadap permasalahan yang dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Jika dilihat dari sistem kepartaian maka sistem kepartaian Indonesia pada tahun 1971-1998 bukanlah sistem dua partai, sementara untuk menggolongkannya sebagai sistem satu atau multipartai pun terdapat banyak ganjalan. Sistem kepartaian Indonesia tahun 1971-1998 adalah sistem kepartaian hegemoni (*Hegemonic Party Sistem*), ciri sistem kepartaian ini adalah Golkar sebagai partai hegemoni terus menerus mendominasi kekuasaan sementara partai-partai politik lainnya yaitu PPP dan PDI hanya secara formal ada namun tanpa kemampuan untuk menandingi kekuatan partai hegemoni tersebut.

Partai Persatuan Pembangunan merupakan fusi dari empat partai Islam, yakni Partai Nadhlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) yang didirikan pada tanggal 5 Januari 1973. Pada masa Orde Baru sistem politik yang diterapkan adalah sistem monopoli kekuasaan, praktek monopoli kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru juga sampai kedalam hal Ideologi, Pancasila diterapkan sebagai ideologi tunggal bagi organisasi politik maupun organisasi masyarakat yang berproses pada masa pemerintahannya. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap partai politik cukup ketat, sehingga perkembangan PPP sebelum tahun 1999 berada di bawah kendali pemerintah, penerapan asas tunggal Pancasila membuat PPP melepaskan asas Islamnya, hal tersebut ikut mempengaruhi pula terhadap perolehan suara PPP pada Pemilihan Umum yang terjadi di Indonesia, bukan hanya ditingkat nasional tetapi juga ditingkat Provinsi maupun Kabupaten.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang menjadi salah satu penyebab buruknya kondisi politik dalam negeri hingga puncaknya terjadi pada tahun 1998 dimana mahasiswa dan masyarakat umum menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto, dan di mulailah masa reformasi dengan mengusung demokrasi sebagai pilar utamanya. Tentu hal ini tidak disiasikan oleh PPP, memasuki masa reformasi yang memberi peluang bagi terjadinya perubahan-perubahan politik dari sistem politik yang di dominasi oleh Presiden yang mempunyai kekuasaan otoriter ke sistem politik demokratis, membuat PPP melakukan ancap-ancang untuk menghadapi Pemilu yang akan diadakan pada tahun 1999 dengan mempercepat Muktamar ke-IV nya dan mengubah asas partai dari Pancasila menjadi Islam serta mengubah lambang partai dari Bintang menjadi Ka'bah.

Maka Pemilu tahun 1999 pun dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia, diantara provinsi yang menyumbangkan suara cukup besar pada Pemilu ini adalah provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada Pemilu masa Orde Baru di Jawa PPP mendapatkan suara yang cukup signifikan dari Jawa Timur, tetapi memasuki reformasi justru suara PPP lebih banyak didapatkan di Jawa Barat, hal ini diantaranya disebabkan karena perubahan peta politik PPP di Jawa Timur dimana sebagian besar warga NU yang berada di sana memberikan suaranya kepada PKB yang berdampak terhadap perolehan suara PPP di Jawa Timur ini, sedangkan perolehan suara PPP di Jawa Barat cenderung stabil.

Adapun strategi yang dilakukan PPP dalam upaya meraih suara pada Pemilihan Umum tahun 1999 di Jawa Barat dilakukan melalui beberapa upaya diantaranya dengan melakukan *door to door* (mendatangi rumah-rumah penduduk) yang melibatkan kader-kader yang militan di seluruh daerah pemilihan. Dilakukannya pendekatan tokoh dalam meraih simpati sekaligus membentuk basis massa maka PPP melakukan strategi kemenangan Pemilu terhadap tokoh masyarakat yang berpengaruh, baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh yang dituakan seperti ulama, kalangan pesantren, dan organisasi kemasyarakatan. Strategi lain adalah dengan pendekatan program, adapun

program-program yang ditawarkan PPP meliputi program dalam bidang keagamaan, politik, ekonomi, hukum dan HAM, sosial-kemasyarakatan dan kebudayaan, serta kesejahteraan masyarakat. PPP melakukan konsolidasi partai dengan melakukan perubahan asas partai kembali ke Islam dan perubahan lambang partai kembali ke Ka'bah, serta melakukan pengembangan jaringan dan basis konstituen dengan melakukan silaturahmi dan kunjungan-kunjungan ke lembaga pendidikan Islam terutama terhadap pesantren-pesantren yang berada di daerah Jawa Barat.

Secara umum pelaksanaan Pemilu tahun 1999 di Jawa Barat berjalan tertib, aman, dan lancar kendati ada beberapa hambatan teknis dan nonteknis di lapangan. Seperti adanya sejumlah pelanggaran mulai dari pembakaran TPS oleh massa, sikap kurang proaktif para saksi utusan partai, pelanggaran batas waktu pencoblosan, aksi penolakan pemilih mencelupkan jari tangannya ke tinta, hingga praktek serangan fajar menjelang pemungutan suara oleh salah satu partai politik. Sekitar 25 juta warga Jawa Barat yang memiliki hak pilih pada hari senin, 7 Juni 1999 menyalurkan aspirasi politiknya dalam suatu Pemilu multipartai, mereka secara antusias menyambut pelaksanaan pesta demokrasi dengan berbondong-bondong mengunjungi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai daerah.

Pada Pemilu tahun 1999 sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar, hasil dari Pemilu tahun 1999 di Jawa Barat menempatkan PPP di urutan ketiga setelah PDI-P di urutan pertama dan Golkar di urutan kedua. Sedangkan daerah yang paling banyak memberikan suara untuk PPP pada Pemilu tahun 1999 di Jawa Barat terdapat di daerah Tasikmalaya, dengan perolehan sebanyak 11 kursi yang berhasil mengungguli partai-partai lainnya. Tasikmalaya dapat memberikan kursi yang cukup banyak bagi PPP karena beberapa alasan, antara lain karena Tasikmalaya merupakan kota santri dan pendukung utama PPP adalah para santri, adanya faktor keturunan, serta adanya peranan integritas pemimpin partai serta peranan ulama di Tasikmalaya.

Secara garis besar kekuatan PPP pada Pemilu tahun 1999 yaitu memiliki asas Islam, lambang Ka'bah, sejarah berdirinya yang didirikan oleh 4 partai Islam (NU, PSII, Parmusi dan Perti), dan adanya dukungan dari para Ulama yang masih tinggi di Jawa Barat. Sedangkan kendala yang PPP temui dalam menghadapi Pemilu tahun 1999 ini adalah faktor yang berasal dari internal seperti kurangnya sumber daya manusia yang cakap, dan kurangnya masalah pendanaan dalam partai, serta faktor eksternal seperti berkembangnya banyak partai hingga 48 partai politik yang mengikuti Pemilu tahun 1999 terutama partai-partai yang berasaskan dan berbasis massa Islam sehingga terjadi persaingan yang begitu ketat antar partai politik tersebut.

Setelah berlangsungnya Pemilu 1999 terdapat beberapa dampak terhadap perkembangan PPP di Jawa Barat antara lain, dampak terhadap kepengurusan partai dimana setelah Pemilu 1999 berlangsung adanya penambahan jumlah kepengurusan harian di DPW PPP Jawa Barat. Dampak terhadap program kerja partai pada perkembangan selanjutnya lebih beragam dan menitikberatkan pada berbagai aspek terutama pada keterlibatan perempuan dalam parlemen. Serta adanya dampak terhadap jabatan strategis dalam pemerintahan, di satu sisi PPP mengalami penurunan jumlah anggota baik di DPRD I maupun DPRD II tetapi di sisi yang lain kekuatan PPP pada Pemilu 1999 merupakan kekuatan murni dan riil yang PPP miliki, selain itu meski dengan jumlah anggota di DPRD I dan DPRD II yang tidak terlalu banyak namun PPP dapat mengantarkan anggota-anggotanya untuk dapat menjabat di posisi strategis seperti jabatan Bupati, Wakil Bupati dan Wakil Gubernur di Jawa Barat.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Dunia Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap pembelajaran sejarah di sekolah, terutama pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Pembahasan yang ada dalam penelitian ini sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) yakni “Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah”, dan sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) kelas XII IPS yaitu “ Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia pada masa reformasi”. Pembahasan dalam penelitian ini tentu sangat berkaitan dengan perkembangan politik Indonesia pada masa awal reformasi, dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi guru sejarah untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah sesuai dengan materi tersebut.

5.2.2 Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan dalam skripsi yang berjudul *Peta Politik PPP pada Pemilihan Umum Tahun 1999 di Jawa Barat* ini, penulis memberikan rekomendasi mengenai kondisi penduduk Jawa Barat pada Pemilihan Umum Tahun 1999 dalam segi ekonomi dan sosial untuk dijadikan bahan kajian secara lebih mendalam lagi, penulis beranggapan jika hal tersebut diteliti akan menarik sekali dan memberikan pemahaman lebih baik mengenai keadaan politik PPP di Jawa Barat.

Sejarah tidak dapat terlepas dari waktu dan tempat, oleh karena itu penulis juga merekomendasikan bagi penelitian mendatang untuk mengkaji mengenai keikutsertaan PPP bukan hanya pada Pemilihan Umum pada masa Orde Baru tetapi juga keikutsertaan PPP pada masa reformasi khususnya pada Pemilihan Umum tahun 2004, 2009 maupun analisis untuk Pemilihan Umum tahun 2014, sehingga dapat terlihat secara jelas mengenai fluktuasi perolehan suara PPP dari masa ke masa dan dapat melengkapi penelitian ini. Untuk tempat sendiri dapat di kaji mengenai perkembangan PPP bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di wilayah Jawa yang lainnya, seperti di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah sehingga dapat terlihat keunikan dan perkembangan PPP secara keseluruhan di masing-masing wilayah, serta diharapkan dapat menggunakan sumber yang lebih banyak lagi sehingga mendapatkan data yang akurat.